



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Nomor 48.1 Tahun 2022 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 48.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.198.197.184.993,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 123.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) yang terdiri atas: Pajak daerah;
 - a. Retribusi daerah;
 - b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.960.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.440.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.600.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.960.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - a. Pajak Hiburan Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - b. Pajak Reklame Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. Pajak Penerangan Jalan Rp. 13.000.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Rupiah);
 - d. Pajak Air Tanah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - e. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Rp. 16.000.000.000 (Enam Belas Miliar Rupiah);
 - g. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Rp.1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.440.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 16.750.000.000,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 9.690.000.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMN Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (4) Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.600.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
 - b. Jasa Giro Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - e. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - h. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
 - i. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
 - j. Pendapatan BLUD Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.061.828.809.993,00 (Satu Triliun Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 981.465.399.496,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.363.410.497,00 (Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 981.465.399.496,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp. 855.924.176.496,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
 - b. Dana Desa Rp 125.541.223.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.363.410.497,00 (Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp. 80.363.410.497,00 (Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- b. Bantuan Keuangan sebesar NIHIL.

Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.368.375.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah Rp. 4.168.375.000,00 (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 9.200.000.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- Belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.086.297.184.993,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 663.057.083.949,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.
- g. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.141.637.523,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- h. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 305.653.539.909,00 (Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);
- i. Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.022.040.967,00 (Tujuh Miliar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- j. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar NIHIL;
- k. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.874.865.550,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- l. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.141.637.523,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja pegawai BLUD.
- h. Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.035.955.434,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- i. Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.080.109.727,00 (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribuan Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- j. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.510.734.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribuan Rupiah);
- k. Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.401.899.862,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribuan Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- l. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.997.500,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribuan Lima Ratus Rupiah);
- m. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00 (Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah);

- n. Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.342.341.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 305.653.539.909,00 (Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.521.474.068,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Enam Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.794.246.641,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.830.385.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.395.922.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.326.910.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.659.602.200 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.125.000.000,00 (Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.022.040.967,00 (Tujuh Miliar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah Rp. 7.022.040.967,00 (Tujuh Miliar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar NIHIL;

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.874.865.550,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya sebesar NIHIL;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp. 13.772.600.000,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.102.265.550,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 16

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp.365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 17

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 236.907.339.844,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
- g. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.120.804.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah);

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.679.657.969,00 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.824.095.072,00 (Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.146.185.826.003,00 (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.996.956.800,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar NIHIL;
- f. Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana termaksud dalam pasal 9 ayat c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja transfer sebagaimana termaksud dalam pasal 9 ayat d direncanakan sebesar Rp. 176.332.761.200,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.540.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 168.792.761.200,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar NIHIL;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 168.792.761.200,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 20

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 defisit sebesar Rp.111.900.000.000,00 (Seratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah);
- b. Pinjaman daerah dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah sebesar NIHIL.

Pasal 22

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.900.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pemberian pinjaman daerah;
- g. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- h. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar NIHIL
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.900.000.000,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
 - (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar NIHIL;
 - (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 142.000.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Rupiah);
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar NIHIL.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 111.900.000.000,00 (Seratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan minus sebesar Rp. 111.900.000.000,00 (Seratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd
PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
AMRULLA, S.H.
NIP.198007152010011018

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	43.960.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	160.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	160.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	160.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	700.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	700.000.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	700.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.500.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.500.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	16.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	16.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.250.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.250.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.440.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	16.750.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.000.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.500.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.500.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.000.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	500.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	500.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.250.000.000
4.1.02.01.08.0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	250.000.000
4.1.02.01.08.0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	250.000.000
4.1.02.01.08.0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	250.000.000
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	250.000.000
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	250.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	500.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	500.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.690.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	3.500.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	340.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	340.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.100.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.100.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.250.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	750.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	500.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.600.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.000.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.000.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.000.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	350.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	350.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	350.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.500.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.000.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	750.000.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	750.000.000
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.000.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000.000
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	10.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	10.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	10.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.828.809.993
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.465.399.496
4.2.01.01	Dana Perimbangan	855.924.176.496
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	209.496.606.496
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.585.791.641
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.481.772.937
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	229.997.743
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.476.463
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.192.729.433
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	25.689.257.945
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	282.756.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	117.170.096.343
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.549.171.991

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	413.939.988.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	412.139.988.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.800.000.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.565.262.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	589.999.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.840.875.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.906.551.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	37.657.107.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.183.982.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	60.099.526.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.287.222.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98.922.320.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.324.400.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.590.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.791.593.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.101.701.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.106.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	321.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.853.060.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	331.070.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.203.957.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	448.700.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.734.839.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	125.541.223.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.05.01	Dana Desa	125.541.223.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	125.541.223.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.363.410.497
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	80.363.410.497
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.363.410.497
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.949.448.704
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.016.587.062
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.420.524.785
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.205.538.833
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.771.311.113
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.368.375.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.168.375.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.168.375.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.168.375.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.168.375.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.200.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.200.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.200.000.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.200.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.198.197.184.993
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	663.057.083.949

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01	Belanja Pegawai	335.141.637.523
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	236.035.955.434
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	176.310.616.073
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	152.338.192.225
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	23.972.423.848
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.503.286.703
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.314.214.759
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.189.071.944
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.025.958.504
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.025.958.504
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.757.799.996
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.757.799.996
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.753.094.947

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.753.094.947
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.337.351.826
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.723.167.888
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.614.183.938
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	111.227.883
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	111.227.883
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	262.580.307
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	261.836.953
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	743.354
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.395.039.003
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.460.256.358
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	934.782.645
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	448.902.866

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	387.490.760
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.412.106
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.255.864.765
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.096.720.171
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	159.144.594
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	874.232.561
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	801.084.911
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	73.147.650
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0
5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.080.109.727
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.763.935.910
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.763.935.910

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.869.743.816
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.869.743.816
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.696.282.120
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.696.282.120
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.750.147.881
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.750.147.881
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.510.734.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.791.593.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	35.791.593.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.101.701.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.101.701.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	617.440.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	568.520.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.401.899.862
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.821.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.821.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	107.471.280
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	107.471.280
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.071.350
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.071.350
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.837.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.837.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.267.812
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.267.812
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.391.565.620
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	92.338.036
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.291.720.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.448.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.448.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.997.500
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.500

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.500
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	13.342.341.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	13.342.341.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	13.342.341.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.653.539.909
5.1.02.01	Belanja Barang	74.521.474.068
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.502.439.068
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.507.785.963
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	299.875.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.462.621.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	533.035.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	137.900.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	279.700.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.360.272.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.405.121.643
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.374.804.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.681.901.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.074.975.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	830.960.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.511.094.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.525.967.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.635.471.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	214.200.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.496.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	380.915.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	441.164.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.051.389.708
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.005.741.914
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.587.115.790
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.170.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.144.030.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	271.425.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.061.187.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.653.572.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.993.509.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.229.989.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	181.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.700.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	51.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	216.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	17.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	520.550.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	507.800.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	54.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	250.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	19.035.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	19.035.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	132.794.246.641
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.136.520.638
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.588.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.492.300.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	181.500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	87.330.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	113.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.040.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.746.728.330
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	173.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.070.255.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.457.050.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.747.800.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	576.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	304.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	84.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	89.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.646.051.500
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.518.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	75.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.191.050.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.987.950.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.781.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	380.200.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	129.600.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	138.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.600.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.960.900.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	571.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.154.576.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	309.320.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	220.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.763.300.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	574.061.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.264.223.808
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	14.875.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	35.900.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	40.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	834.750.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.120.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	550.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.694.265.109
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.241.361.109
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	351.480.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	22.672.860.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	756.960.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	655.604.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	15.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.046.622.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	12.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	268.900.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	62.150.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	82.322.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	114.250.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	202.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	254.000.000
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	2.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.142.363.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	260.650.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.542.550.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	4.500.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	776.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	476.913.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	81.750.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	338.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	294.000.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	44.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.464.750.894
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.497.750.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.135.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.230.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	28.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	669.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.275.000.894

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	370.000.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	210.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	650.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	400.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.278.600.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	455.600.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	300.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	25.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	498.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	216.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	216.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.462.125.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.290.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	171.625.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.830.385.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	89.875.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	89.875.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.092.450.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.248.450.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	348.750.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	174.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	210.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	63.600.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	46.850.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	75.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.573.060.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.398.060.000
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	175.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.395.922.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.395.922.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.436.331.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.472.688.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	396.103.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90.800.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.326.910.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.908.110.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	708.760.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	256.150.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	20.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	908.200.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	15.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.418.800.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.418.800.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.659.602.200
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.659.602.200
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.659.602.200
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.125.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.125.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.125.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	7.022.040.967

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.022.040.967
5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	7.022.040.967
5.1.03.03.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	7.022.040.967
5.1.05	Belanja Hibah	14.874.865.550
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.772.600.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	9.444.600.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	8.044.100.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	1.400.500.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.028.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.028.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.102.265.550
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.102.265.550
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.102.265.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	365.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	365.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	365.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	365.000.000
5.2	BELANJA MODAL	236.907.339.844
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.120.804.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.120.804.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.120.804.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.120.804.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.679.657.969
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	69.200.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	69.200.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	17.000.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	30.000.000
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	22.200.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.099.500.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.092.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.400.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	120.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.500.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	7.500.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	96.500.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	42.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	42.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.050.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.050.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	49.450.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	36.200.000
5.2.02.03.03.0007	Belanja Modal Universal Tester	13.250.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	325.220.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	325.220.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	14.000.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	308.220.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.670.711.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.176.476.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	145.326.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.031.150.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.494.235.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	956.335.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	225.850.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	157.050.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	810.200.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	344.800.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	260.650.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	243.250.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	243.250.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	17.400.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.000.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.400.000
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	1.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.859.411.469
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.129.087.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	360.000.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	769.087.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	31.730.324.469
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	31.730.324.469
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.661.613.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.350.130.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	513.250.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	836.880.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	311.483.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	297.483.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	150.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	150.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	150.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	49.800.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	49.800.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	49.800.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.137.052.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.137.052.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.979.627.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	54.850.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	102.575.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	200.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.824.095.072
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.649.095.072
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.149.095.072

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.928.673.255
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.893.665.020
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.171.881.797
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	4.983.375.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.006.500.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	165.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.500.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.500.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.400.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.400.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.400.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	775.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	775.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	775.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.185.826.003
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	115.773.275.106
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106.008.275.106
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	89.919.525.106
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.475.000.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.215.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.398.750.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.765.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.765.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	22.947.550.897
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.947.550.897
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	582.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	240.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	22.125.550.897
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.450.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	300.000.000
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	300.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.150.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	7.150.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.996.956.800
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	59.500.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	59.500.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	59.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	25.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.912.456.800
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.912.456.800
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.912.456.800
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	176.332.761.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.540.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.540.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.540.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.540.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168.792.761.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.792.761.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.792.761.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.792.761.200
	Jumlah Belanja	1.086.297.184.993

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Total Surplus/(Defisit)	111.900.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	151.900.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.900.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.900.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.900.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.900.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	142.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	142.000.000.000

KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	142.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	142.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	151.900.000.000
	Pembiayaan Netto	(111.900.000.000)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
AMRULLA, S.H.
NIP.198007152010011018